

# KINERJA BPOM

Dalam Angka Triwulan IV\*

\*data s/d November 2023

2023



• • • •

**KINERJA BPOM  
DALAM ANGKA  
TRIWULAN IV\* 2023**

• • • •

# SAMBUTAN KEPALA BPOM RI



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan IV\* Tahun 2023 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan

Triwulan IV\* Tahun 2023, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 172.669 NIE, pemeriksaan terhadap 34.530 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 74.555 sampel, 255 perkara, dan 495 kegiatan pelaksanaan KIE.

Tahun 2023 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM semakin intensif dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan IV\* Tahun 2023. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 29 Januari 2024

Pt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, M.Pharm., Apt.

# Daftar Isi

SAMBUTAN BPOM RI .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
HIGHLIGHT .....	1
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan .....	7
II. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan .....	15
III. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman .....	21
IV. Analisis Kebijakan Obat dan Makanan .....	25
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan .....	27
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat .....	29
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik .....	39
VIII. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan .....	45
IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	51
X. Kerjasama Internasional .....	55
XI. Sumber Daya Manusia .....	61
XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan November 2023 .....	63
XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM .....	65
PENUTUP .....	65
LAMPIRAN .....	67

# Daftar Gambar

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan .....	7
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan .....	7
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan .....	8
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan .....	8
Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan .....	11
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan .....	11
Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan .....	12
Gambar 8. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan .....	15
Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan Berdasarkan Komoditi s.d November 2023 .....	16
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d November 2023 .....	17
Gambar 11. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d November 2023 .....	18
Gambar 12. Data Publikasi Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi s.d. Triwulan IV 2023 .....	29
Gambar 13. Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan IV 2023 .....	30
Gambar 14. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d. Triwulan IV 2023 .....	31
Gambar 15. Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan IV 2023 .....	32
Gambar 16. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV 2023 .....	32
Gambar 17. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media s.d. Triwulan IV 2023 .....	33
Gambar 18. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2023 .....	35
Gambar 19. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi .....	36
Gambar 20. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media .....	36
Gambar 21. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM .....	37
Gambar 22. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM .....	37
Gambar 23. Aktivitas pada BPOM Mobile Periode 2018 – 15 Desember 2023 .....	40
Gambar 24. Statistik Pemanfaatan SIPT s.d. Triwulan IV Tahun 2023 .....	41
Gambar 25. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan IV 2023 .....	48
Gambar 26. Realisasi Anggaran s.d November 2023 .....	63

# Daftar Tabel

Tabel 1.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) .....	9
Tabel 2.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) .....	10
Tabel 3.	Profil Laporan Efek Samping .....	12





# KONFERENSI PERS

Penyerahan Izin Edar Produk Biologi Baru: Efesa (Efepoetin Alfa)

Produk Biologi Efepoetin Alfa Pertama yang Dikembangkan dan Diproduksi di Indonesia

Jakarta, 23 Oktober 2023



# Highlight

## Bersama Kembangkan Pangan Olahan Sorgum dari Hulu ke Hilir



Mojokerto, Kamis (02/11/2023). Kepala BPOM, Penny K. Lukito, mengajak para pelaku usaha pangan olahan untuk memanfaatkan sorgum sebagai bahan baku pangan olahan. Penny K. Lukito menyatakan BPOM siap untuk melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada para pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi produk olahan sorgum. Ajakan ini disampaikan Kepala BPOM kepada komunitas petani di Provinsi Jawa Timur, komunitas kuliner (Jalansutra), komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Mojokerto, ibu-ibu PKK dan pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto. Kepala BPOM membuka secara langsung kegiatan Sarasehan Jaminan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Olahan Berbahan Dasar Sorgum.

## B POM Siapkan Agen Perubahan untuk Ikut Berkomitmen dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba di Indonesia



Jakarta, Selasa (22/11/23). Memperingati Pekan Antimikroba Sedunia atau *The World Antimicrobial Resistance (AMR) Awareness Week (WAAW) Tahun 2023*, B POM menggelar Talkshow Pengendalian Resistensi Antimikroba. Bertajuk *Ngobrol Asik Antibiotik*, tema yang diangkat pada talkshow ini adalah 'Lindungi Diri, Lindungi Lingkungan, Buang Antibiotik dengan Benar!'. Dalam sambutannya, Plt. Kepala B POM menjelaskan bahwa resistensi antimikroba menjadi salah satu ancaman terberat dalam kesehatan dan pembangunan global. Indonesia termasuk 5 (lima) negara yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan persentase penggunaan antimikroba pada 2030, sejalan dengan prevalensi resistensi antimikroba di Indonesia yang relatif meningkat.

## BPOM Berikan NIE untuk Efesa sebagai Inovasi Produk Biopharmaceutical di Dunia



Jakarta, Senin (23/10/2023). Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyerahkan nomor izin edar (NIE) untuk Produk Jadi *Efepoetin Alfa* (Efesa) sebagai produk biologi baru pengembangan dalam negeri. Produk yang diprakarsai oleh PT Kalbio Global Medika ini merupakan produk biopharmaceutical yang bekerja membantu produksi sel darah merah untuk pengobatan anemia pada pasien ginjal kronik tanpa dialisis. Penny K. Lukito mengatakan bahwa produk ini merupakan bukti nyata dari industri farmasi dalam negeri yang mampu mengembangkan sekaligus memproduksi produk biopharmaceutical golongan erythropoiesis stimulating agents (ESA).

## Kepala BPOM Resmikan 3 UPT Baru dan Tingkatkan Klasifikasi 8 UPT BPOM



Kediri, Selasa (24/10/2023). “Penguatan organisasi UPT terus diupayakan untuk merespons tantangan yang terus berkembang serta memberikan pelayanan publik lebih optimal. Alhamdulillah, tahun ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui peningkatan klasifikasi 11 UPT BPOM. Sebanyak 8 Loka POM setingkat eselon IV menjadi Balai POM setingkat eselon III. Selain itu, 3 Loka POM baru dibentuk dari Pos POM,” kalimat berikut yang disampaikan Kepala BPOM, Penny K. Lukito saat memberikan sambutannya pada kegiatan peresmian 8 Balai POM dan 3 Loka POM yang bertempat di Pendopo Panjalu Jayati di Kediri, Jawa Timur. Dengan didampingi oleh masing-masing Bupati/Walikota/pemerintah kabupaten/kota yang mewakili wilayah UPT yang diresmikan, dilakukan penandatanganan prasasti bersama Kepala BPOM. Delapan Balai POM tersebut yaitu, Balai POM di Payakumbuh, Tangerang, Tasikmalaya, Bogor, Surakarta, Kediri, Jember, dan Palopo. Sedangkan 3 Loka POM baru terdiri dari Loka POM di Kabupaten Sambas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Timur.





# BAB I

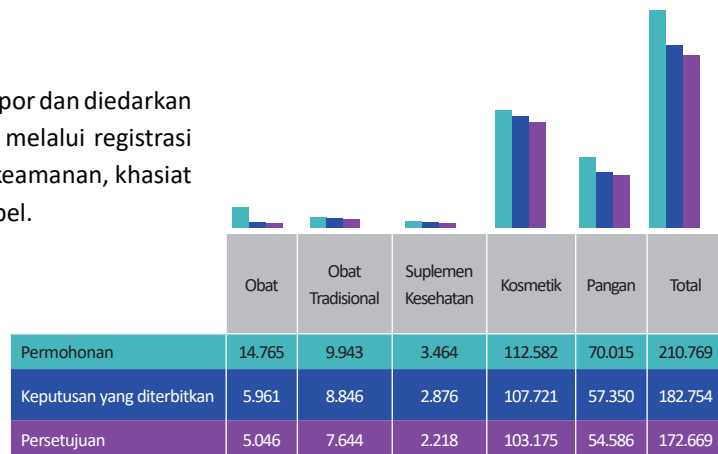
## Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

### Pengawasan *Pre-market*

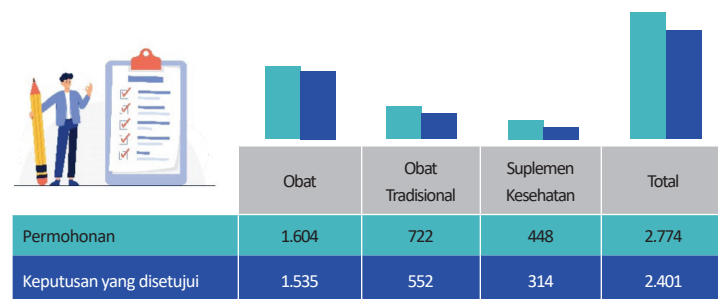
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan November Tahun 2023, telah diterbitkan 182.754 keputusan dan 172.669 persetujuan izin edar dari 210.769 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan November Tahun 2023, dari 2.774 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 2.401 (86,55%) iklan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

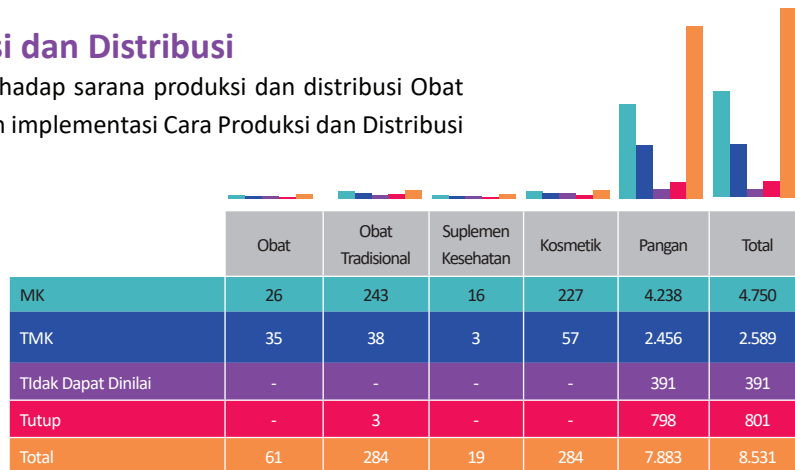
## Pengawasan *Post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

### Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

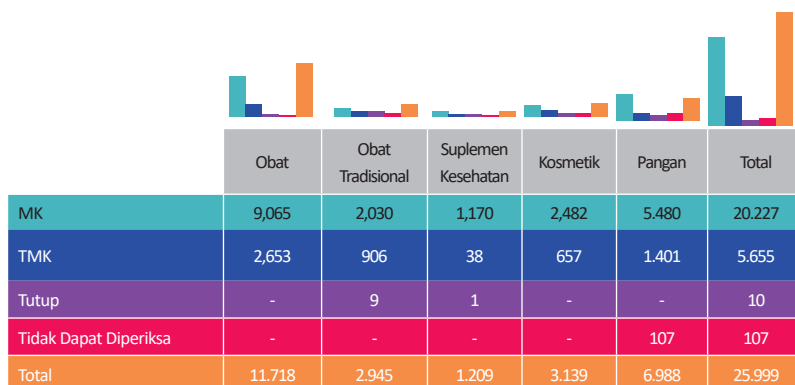
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.

Sampai dengan November Tahun 2023 telah diperiksa sebanyak 8.531 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 2.589 (30,34%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan November Tahun 2023 telah diperiksa sebanyak 25.999 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 5.655 (21,75%) sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Keterangan

TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan

MK : Memenuhi Ketentuan

## Sampling dan Pengujian Laboratorium

### a. Targeted

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Tageted	3.307	2	9	1	73	3.295	2.972	2.886	86	98	323	2.984
Obat tradisional	Tageted	3.720	1	-	-	172	3.719	3.477	3.112	365	366	242	3.478
kuasi	Tageted	251	-	-	-	8	251	233	219	14	14	18	233
Suplemen Kesehatan	Tageted	1.012	-	-	-	16	1.012	959	902	57	57	53	959
Kosmetik	Tageted	7.144	6	-	-	518	7.138	6.592	6.029	563	569	546	6.598
Rokok	Tageted	190	-	-	-	12	190	52	38	14	14	138	52
Pangan	Tageted	12.237	2	3	-	774	12.232	11.072	9.855	1.217	1.222	1.160	11.077

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM November 2023

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (*Targeted*)

Sampai dengan November tahun 2023, dari 27.861 sampel *targeted* yang disampling terdapat 25.381 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 2.316 (9,12%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:  
 MS = Memenuhi Syarat  
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat  
 TIE = Tanpa izin Edar

## b. Random

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	13.619	2	-	-	280	13.617	12.781	12.455	326	328	836	12.783
Obat tradisional	Random	8.663	10	-	1	336	8.652	8.127	7.367	760	771	525	8.138
kuasi	Random	875	-	-	-	13	875	792	771	21	21	83	792
Suplemen Kesehatan	Random	2.305	-	-	-	32	2.305	2.159	1.984	175	175	146	2.159
Kosmetik	Random	17.312	22	2	-	920	17.288	16.412	15.491	921	945	876	16.436
Pangan	Random	9.774	2	-	1	657	9.771	8.927	7.977	950	953	844	8.930

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM November 2023

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (*Random*)

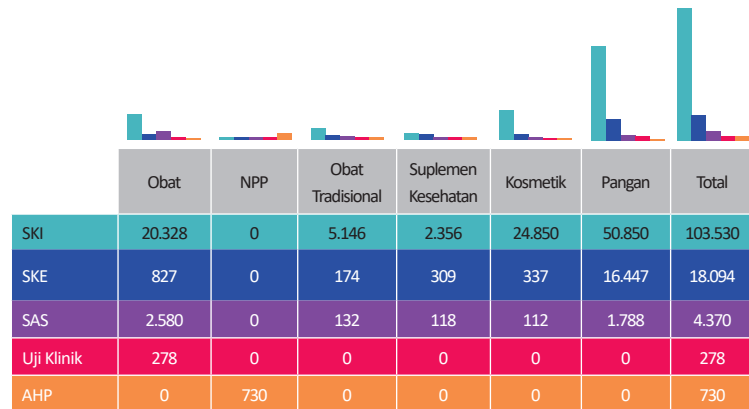
Sampai dengan November tahun 2023, dari 52.548 sampel random yang disampling terdapat 49.238 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 3.153 (6,40%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:  
 MS = Memenuhi Syarat  
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat  
 TIE = Tanpa izin Edar

## Sertifikasi

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan November tahun 2023 telah diterbitkan 103.530 SKI, 18.094 SKE, 4.730 SAS, 278 Uji Klinik, dan 730 AHP Obat dan Makanan.

Keterangan: \* Termasuk Kuasi

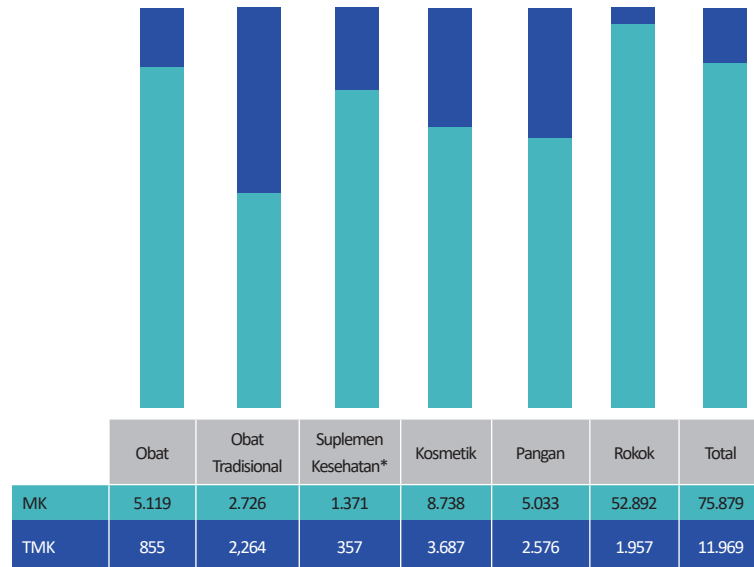


Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

## Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/ brosur. Sampai dengan November Tahun 2023, dari 87.575 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 11.696 (13,35%) iklan tidak memenuhi ketentuan.

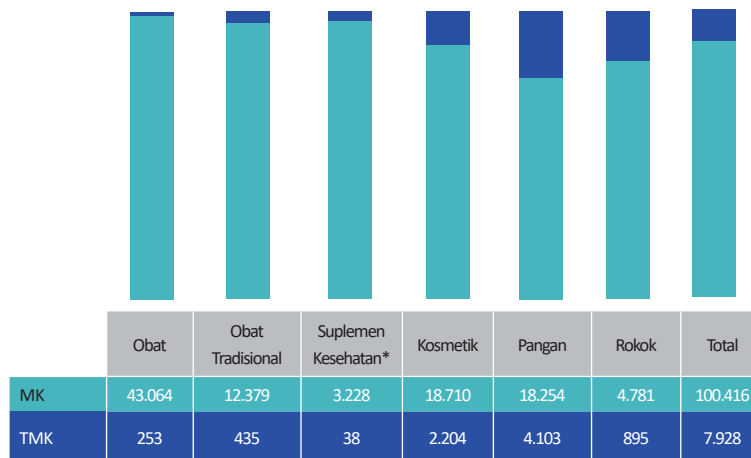
Keterangan: \* Termasuk Kuasi



Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

## Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan November Tahun 2023, dari 108.344 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 7.928 atau sekitar 7,31% label tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Keterangan: \* Termasuk Kuasi

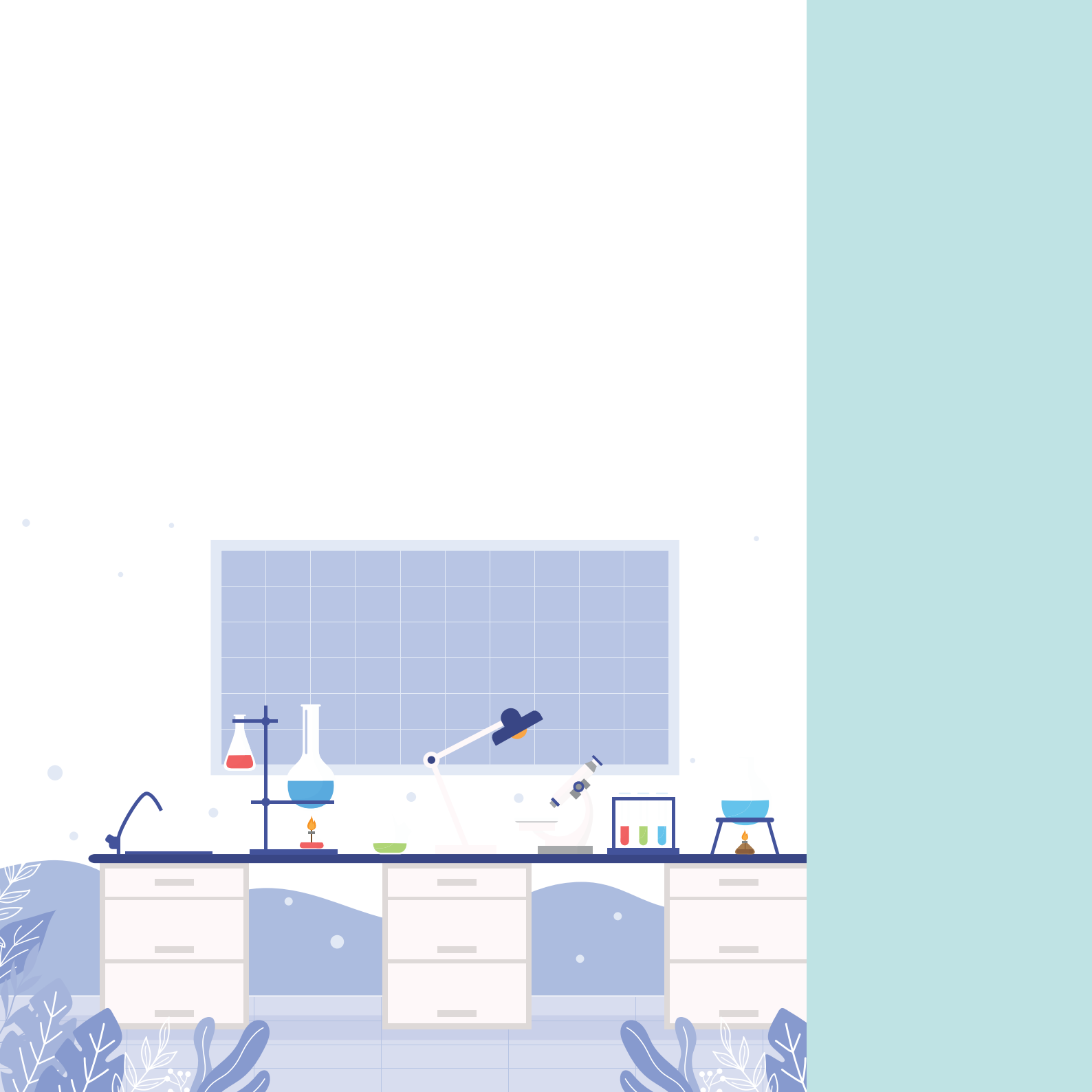
## Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjut	%
Obat	12.499	8.765	70,13
Obat Tradisional	10	10	100,00
Suplemen Kesehatan	19	19	100,00
Kosmetik	651	621	95,39

Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.





# BAB II

## Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

### 1. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta rawan kasus, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

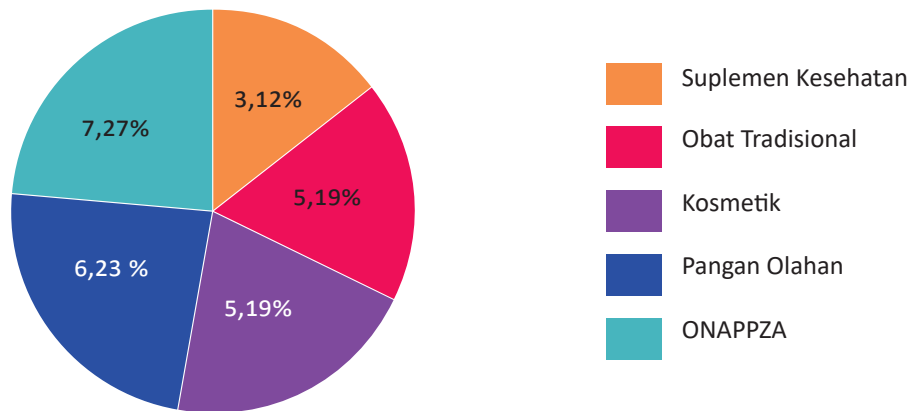


Gambar 8. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

Sampai dengan November 2023, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 2.841 kasus yang terdiri dari 966 kasus terkait obat, 671 kasus terkait obat tradisional, 12 kasus suplemen kesehatan, 960 kasus terkait kosmetik dan 232 kasus terkait komoditi pangan.

## 2. Hasil Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya BPOM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik di premarket maupun postmarket. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun projusticia.



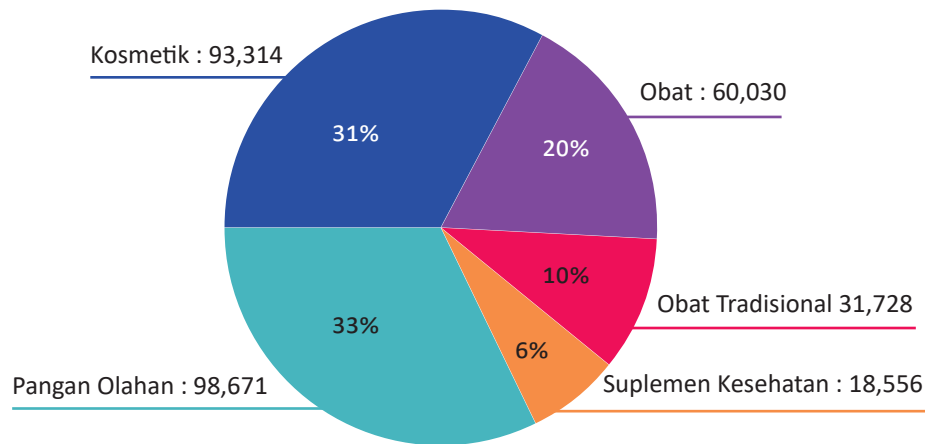
Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan Berdasarkan Komoditi s.d November 2023

Pada periode tahun 2023 dari pelaksanaan kegiatan intelijen telah tersusun 187 laporan informasi, sedangkan dari pelaksanaan operasi intelijen tersusun 17 laporan intelijen, Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 26 rekomendasi intelijen dengan 7 kasus ONAPPZA, 5 kasus kosmetik, 5 kasus obat tradisional dan 3 kasus suplemen kesehatan serta 6 kasus pangan olahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

### 3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk obat dan makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan Bulan November tahun 2023, ditemukan sebanyak 302.299 *link* yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



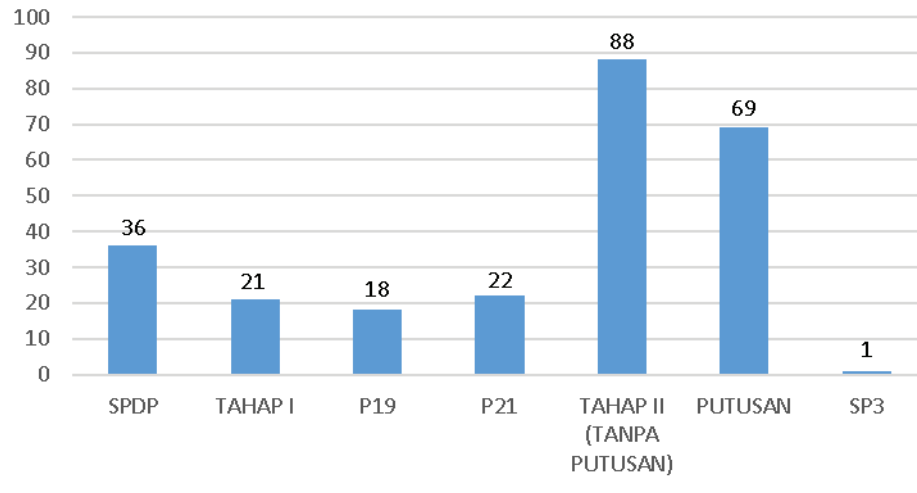
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d November 2023

#### 4. Hasil Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan November tahun 2023, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 255 perkara dengan pro Justitia. Sebanyak 36 perkara masih dalam tahap SPDP, 21 perkara pada tahap I, 18 perkara pada tahap P18/19, 22 perkara pada tahap P21, 88 perkara pada tahap II, 69 perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan, dan terdapat 1 perkara SP3.

Posisi Perkara di Bidang Obat dan Makanan



Gambar 11. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d November 2023





# BAB III

## Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman

### Obat

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Pada tahun 2023 terdapat 17 peraturan/standar/pedoman obat yang diproses penyusunan. Daftar 17 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan November 2023 sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM tentang Obat Pengembangan Baru (12,5%) diubah menjadi Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Penggunaan Obat dan Vaksin COVID-19 Pasca Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia (100%).
2. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Cara Regulatori Obat yang Baik (GRP) (100%).
3. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/ Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Hanya Substansi Obat) (75%).
4. Penyusunan Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Lampiran XVI) (100%).
5. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Metodologi Spesifik Zat Aktif Uji Bioekivalensi (100%).
6. Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Verifikasi Metode Analisis Obat Kimia diubah menjadi Pedoman Verifikasi Metode Analisis Kimia Obat dan Bahan Obat (83,33%).
7. Petunjuk Teknis Pemenuhan terhadap Kompendial Standar Mutu Untuk Penyusunan Farmakope Indonesia (83,33%)
8. Standar Mutu Untuk Penyusunan Farmakope Indonesia (83,33%).
9. Rancangan Standar Obat Non Kompendial (SONK) (100%).
10. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Pedoman Penilaian Mutu dan Kemasan Produk Radiofarmaka (100%).
11. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No. 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang tidak memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label (87,5%).

12. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (100%).
13. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2018 Tentang tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (100%).
14. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis (25%) diubah menjadi Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kualifikasi Pemasok Bahan Obat (100%)
15. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat (100%).
16. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring (100%).
17. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik (25%) diubah menjadi Revisi Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi (100%).

## Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 12 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun sampai dengan November Tahun 2023. Daftar 12 peraturan/standar/pedoman tersebut sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional (90%).
2. Rancangan Pedoman Empiris Obat Tradisional (90%).
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praklinik Secara In Vivo (Lampiran) (90%).
4. Pedoman Inovasi Teknologi dan Pendekatan Standardisasi (90%).
5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan (100%).
6. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan mengandung Probiotik (90%).
7. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Stabilitas Suplemen Kesehatan (100%).
8. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Cemaran Dalam Kosmetik (90%).
9. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika (90%).

10. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika (90%).
11. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik (100%).
12. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM RI tentang Perubahan Bahan yang Diizinkan dalam Kosmetik (100%).

Sampai dengan November 2023 ini telah diselesaikan 132 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

## Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang disusun pada tahun 2023. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan November 2023 sebagai berikut:

1. Pedoman Pengkajian Penetapan Kategori Pangan (100%).
2. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang Dalam Pangan Olahan (100%).
3. Penyusunan Naskah Kebijakan terkait *Date Marking (Use-By dan Best-Before Date)* Produk Pangan dalam rangka mendukung Produksi Berkelanjutan (100%).
4. Penyusunan Pedoman Meminimalkan Potensi AMR Bawaan Pangan Olahan (*Foodborne AMR*) (100%).
5. Penyusunan Pedoman/Kode Praktis Mitigasi Risiko terkait Cemar (MCPDE-GE, BPA) (100%).
6. Penyusunan Pedoman Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan (95%).
7. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan (90%).
8. Penyusunan Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah untuk UMKM (100%).
9. Penetapan Informasi Nilai Gizi Pada Bagian Depan Label Yang Mudah Dipahami Masyarakat (FoPNL traffic light) (100%).
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (80%).
11. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) (100%).

Badan POM juga menyusun kajian terkait pangan olahan. Sampai dengan bulan November 2023 telah diselesaikan 156 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

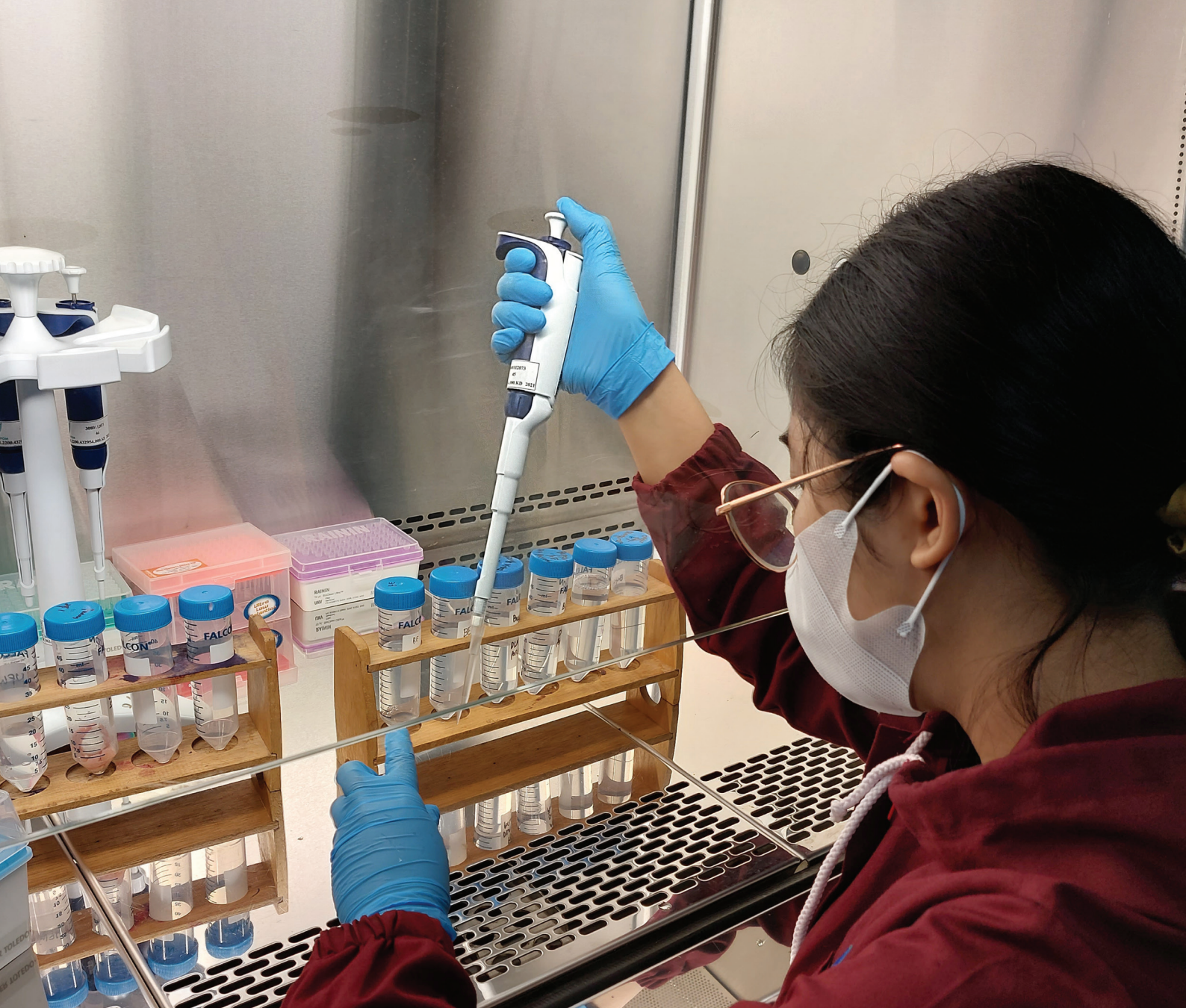


# BAB IV

## Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat penambahan sebanyak 1 topik kajian pada bulan Mei, sehingga jumlah total topik kajian menjadi 11 topik. Daftar 11 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM beserta progres penyusunan sampai dengan bulan November tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (98%).
2. Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan (100%).
3. Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat (90%).
4. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (100%).
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM (90%).
6. Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi (90%).
7. Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok *Reserve* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian (93%).
8. Kajian Polutan Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan (90%).
9. Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan (91%).
10. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia *Risk Assessment Center* (INARAC) (90%).
11. Evaluasi Program Penataan dan Perkuatan UPT POM (93%)



# BAB V

## Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

### 1. Metode Analisis yang Dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis (MA) Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psiko tropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan untuk membuat kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan IV telah dikembangkan 200 metode analisis.

### 2. Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan IV 2023 telah dikembangkan 109 baku pembanding.

### 3. Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, terdapat 2.397 sampel yang diterima telah selesai diuji di laboratorium PPPOMN. Dari 2.356 sampel yang telah selesai uji, sebanyak 2.327 sampel yang telah selesai uji memenuhi ketentuan timeline sehingga persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 98,77 %.

### 4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, telah dilakukan kalibrasi terhadap 3.486 peralatan laboratorium.

### 5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

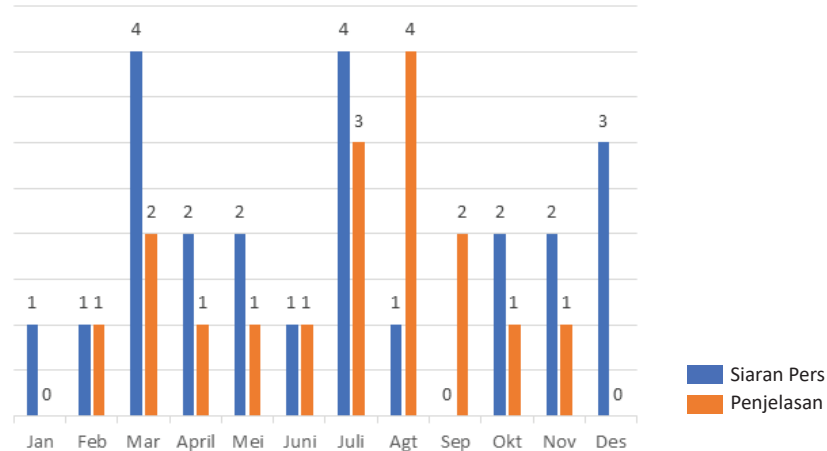
Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/ keahlian. Pada tahun 2023, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 12 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, Badan POM telah berpartisipasi dalam 12 jejaring laboratorium.



# BAB VI

## Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

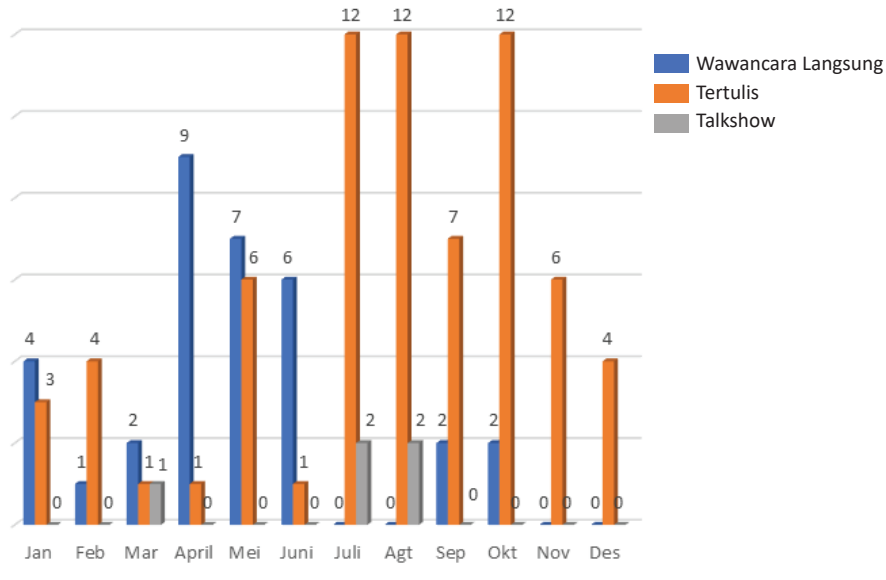
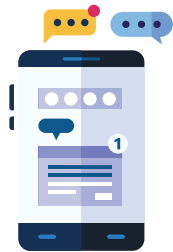
Sepanjang tahun 2023, Badan POM telah menerbitkan 23 siaran pers dan 17 penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan Juli sebanyak 4 siaran pers dan 3 penjelasan/klarifikasi.



Gambar 12. Data Publikasi Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi s.d. Triwulan IV 2023

Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas, antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum/kinerja. Topik yang paling sering dibahas sampai dengan triwulan IV tahun 2023 yaitu terkait komoditas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (9 siaran pers). Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui website dan media sosial Badan POM.

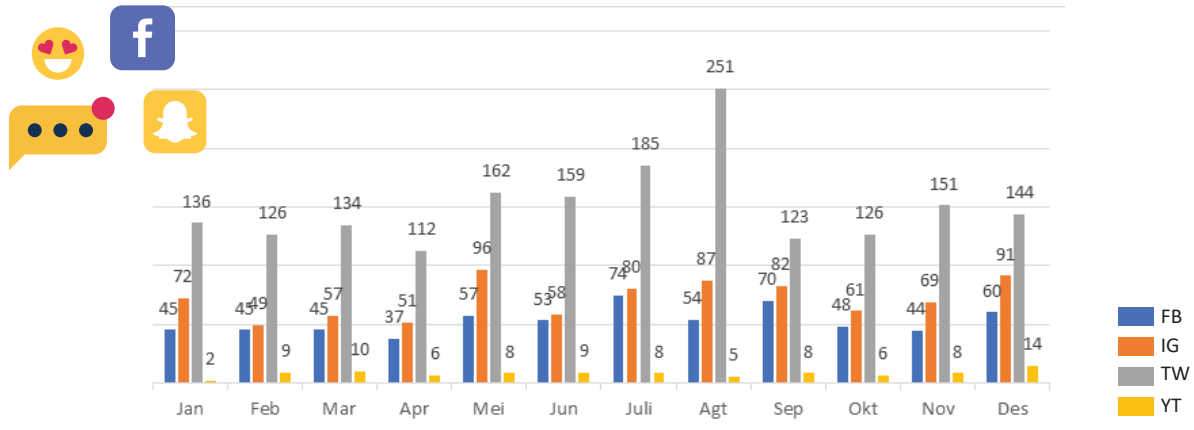
Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui *website* resmi Badan POM dan disebarakan kepada media massa. Tercatat sebanyak 143 berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM sepanjang tahun 2023.



Gambar 13. Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan IV 2023

Hingga triwulan IV tahun 2023, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara/*talkshow* serta pemberian jawaban tertulis. Dari 134 permohonan wawancara dari media, 107 permohonan telah ditindaklanjuti (79,85%) dengan rincian kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan adalah 33 wawancara langsung, 69 jawaban tertulis dan 5 pemenuhan narasumber untuk program *talkshow*.

Pada triwulan IV tahun 2023, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 *platform* media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube cukup aktif dengan rata-rata 3-4 unggahan konten per hari. *Platform* Twitter adalah *platform* yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 421 *tweets* dibandingkan dengan 3 *platform* media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 221 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 152 unggahan, serta Youtube sebanyak 28 unggahan. Sedangkan total unggahan media sosial sepanjang 2023 di berbagai *platform* sebagai berikut:



Gambar 14. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan *Platform* s.d. Triwulan IV 2023

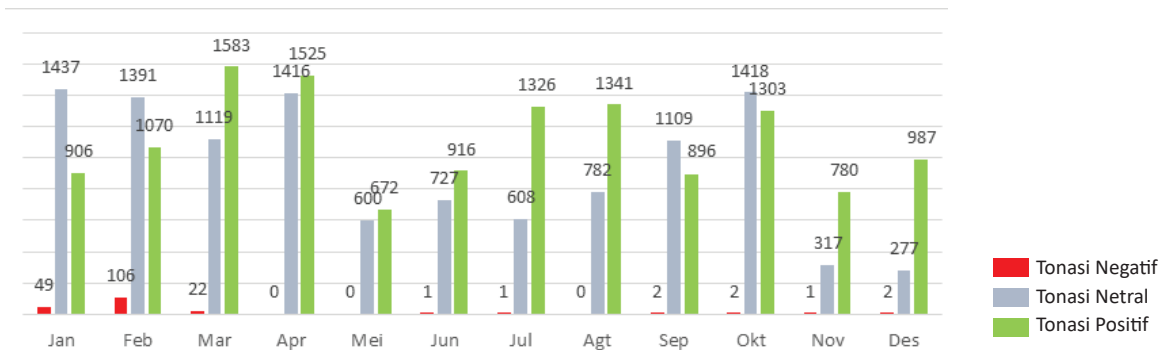
Secara garis besar, total unggahan sampai dengan triwulan IV 2023 di berbagai *platform* adalah 3.387 konten. Rincian jumlah unggahan per bulannya adalah 255 unggahan di bulan Januari, 229 unggahan di bulan Februari, 246 unggahan di bulan Maret, 206 unggahan di bulan April, 323 unggahan di bulan Mei, 279 unggahan di bulan Juni, 347 unggahan di bulan Juli, 397 unggahan di bulan Agustus, 283 unggahan di bulan September, 241 unggahan di bulan di Oktober, 272 unggahan di bulan November dan 309 unggahan di bulan Desember.

Top engagement content terkait Badan POM pada keempat platform dapat dilihat pada gambar berikut:



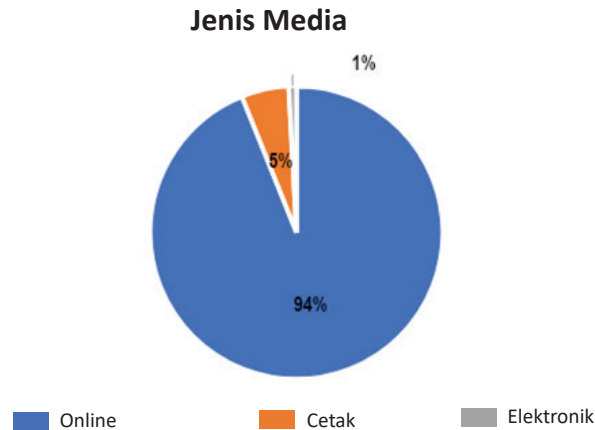
Gambar 15. Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan IV 2023

Pemberitaan terkait Obat dan Makanan dan Badan POM sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mencapai 24.692 pemberitaan, yang terdiri dari 53,89% berita bertonasi positif (13.305) berita, 45,36% bertonasi netral (11.201 berita), dan 0,75% bertonasi negatif (186 berita). Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.



Gambar 16. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV 2023

Pada triwulan IV, pemberitaan positif didominasi oleh topik pernyataan BBPOM Surabaya terkait miras saset. Pemberitaan netral didominasi oleh topik regulasi pemerintah tentang barang impor. Sedangkan pemberitaan negative mengenai topik perkembangan kasus GGAPA.

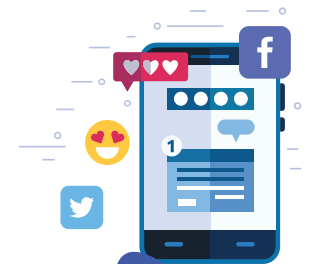


Gambar 17. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media s.d. Triwulan IV 2023

Berdasarkan jenis media, media yang memberitakan terkait Badan POM dan isu Obat dan Makanan hampir seluruhnya berasal dari media *online* sebesar 93,95% (23.198 berita), sedangkan media cetak 5,20% (1.284 berita) dan media elektronik 0,85% (210 berita).

Sampai dengan triwulan IV 2023 terdapat berbagai topik pemberitaan yang terkait dengan Badan POM. Topik pemberitaan di bulan Januari didominasi oleh Kementerian Kesehatan akan memulai vaksinasi *booster* kedua untuk masyarakat umum dan Bareskrim Polri terus mengembangkan penyelidikan mengenai produsen yang diduga melakukan pelanggaran pada produksi sirup obat. Pada bulan Februari, pemberitaan didominasi oleh konferensi pers Badan POM mengenai Langkah Antisipatif Badan POM Terhadap Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak pada tanggal 8 Februari 2023 yang menunjukkan hasil pengujian Badan POM pada sejumlah sirup obat Praxion masih aman digunakan. Pada bulan Maret, Badan POM gerebek sebuah pabrik yang diduga memproduksi kosmetik dan produk kecantikan ilegal di kawasan pergudangan Elang Laut Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara. Pada April, pemberitaan didominasi oleh penjelasan terkait hasil pengawasan produk mi instan asal Indonesia di Taiwan. BPOM menerbitkan penjelasan terkait regulasi Batas Maksimal Residu (BMR) 2-CE melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida. Selain itu, terdapat pemberitaan terkait klarifikasi produsen soal mi instan Taiwan. Pada Mei, pemberitaan didominasi oleh penerbitan EUA untuk vaksin booster Indovac dan pembongkaran kasus obat palsu oleh Polri. Pihak Bio Farma menyatakan BPOM telah memberikan EU vaksin Indovac untuk vaksin penguat bagi warga berusia 18 tahun ke atas yang mendapat vaksin primer Pfizer. Pemberitaan terkait mi instan Indonesia di Taiwan juga masih muncul

pada bulan ini. Pada Juni, pemberitaan didominasi oleh konferensi pers BPOM terkait penindakan obat ilegal. BPOM menemukan dan menyita sejumlah barang bukti sediaan farmasi ilegal berupa obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan ilegal yang tidak memiliki izin edar sebanyak 700 item (22.552 buah). Pada bulan Juli 2023, pemberitaan didominasi oleh temuan 1.541 produk kosmetik ilegal di seluruh Indonesia berdasarkan penelusuran BPOM sepanjang tahun 2022. Bukan hanya kosmetik, sederet obat ditemukan BPOM mengandung bahan kimia obat dan diedarkan tanpa izin. Sepanjang 2022 terdapat 777 kasus obat tradisional ilegal di Indonesia. Produk tersebut tidak bisa dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya. Konferensi pers Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) menjadi pemberitaan terbanyak pada bulan Agustus 2023. Ditjen Bea Cukai dan BPOM berhasil menggagalkan pengiriman 430 karton obat tradisional ilegal dengan total berat 5 ton. Kepala BPOM katakan obat tradisional yang akan dikirim ke Uzbekistan tersebut mengandung bahan kimia obat. Pada September 2023, pemberitaan terbanyak tentang regulasi platform *e-commerce*. Pemerintah siap mengenakan sanksi keras hingga penutupan izin media sosial yang sekaligus melakukan aktivitas jual beli elektronik karena merugikan sebagian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikasi halal sedangkan produk kecantikan terdaftar di BPOM. Pada Oktober, pemberitaan didominasi oleh pemerintah segera memberlakukan beberapa regulasi yang bertujuan untuk memperketat arus masuk barang impor. Perubahan dan perbaikan regulasi akan segera dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada November 2023, pemberitaan didominasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap 13 Perwira Tinggi (Pati) Polri. Adapun ke-13 Pati Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat salah satunya Azis Saputra menjadi Brigjen Polri sebagai Direktur Penyidikan Obat dan Makanan BPOM. Pada Desember 2023, pemberitaan didominasi oleh BPOM menyita ratusan item obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat (BKO) serta kosmetik mengandung bahan berbahaya. Jumlah obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung BKO yang ditemukan pada periode September 2022 hingga Oktober 2023 mencapai 51 item atau sekitar satu juta pieces, sementara jumlah kosmetik berbahaya mencapai 183 item atau 1,2 juta pieces.

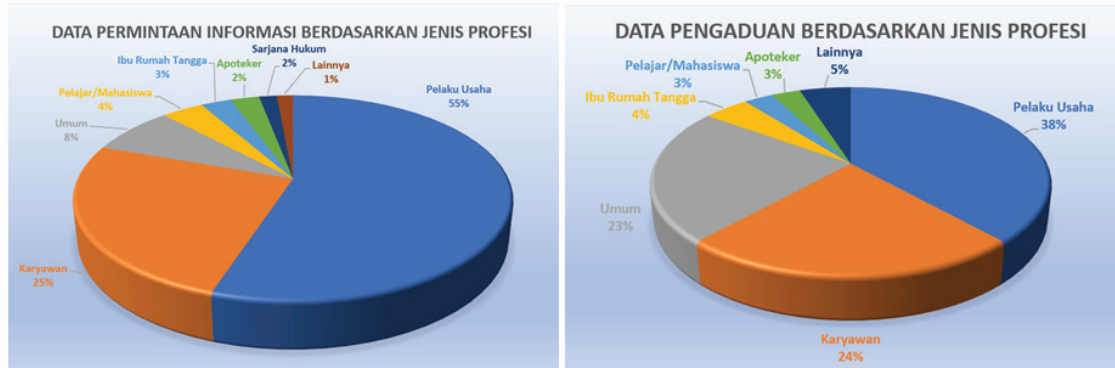





Gambar 18. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan IV Tahun 2023

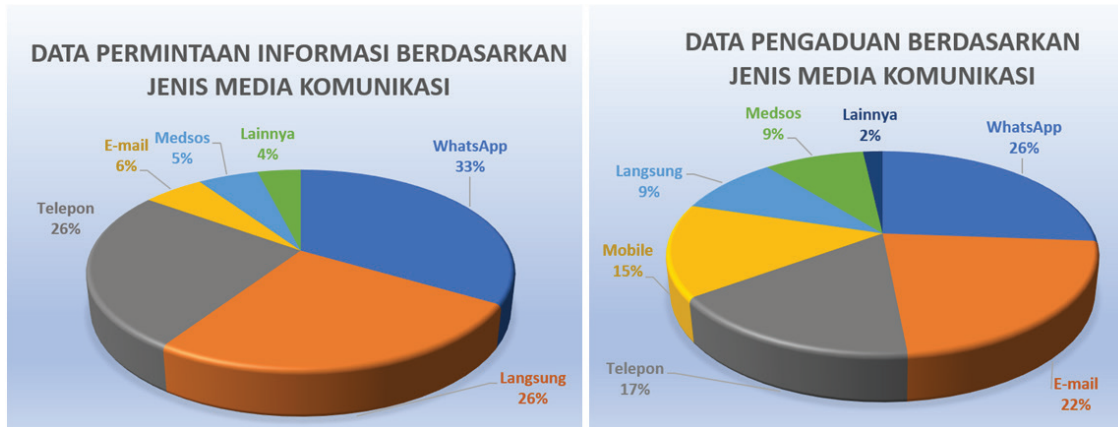
Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, sebanyak 179 permintaan informasi publik telah diselesaikan, meliputi 165 (92%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 7 (4%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 7 (4%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak tersebut karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian (tidak lebih dari 17 hari kerja).

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat periode Januari-Desember tahun 2023, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 73 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta *Conac Cener* HALOBPOM sebanyak 52.940 layanan, terdiri dari 51.023 (96,38%) layanan permintaan informasi dan 1.917 (3,62%) layanan pengaduan.



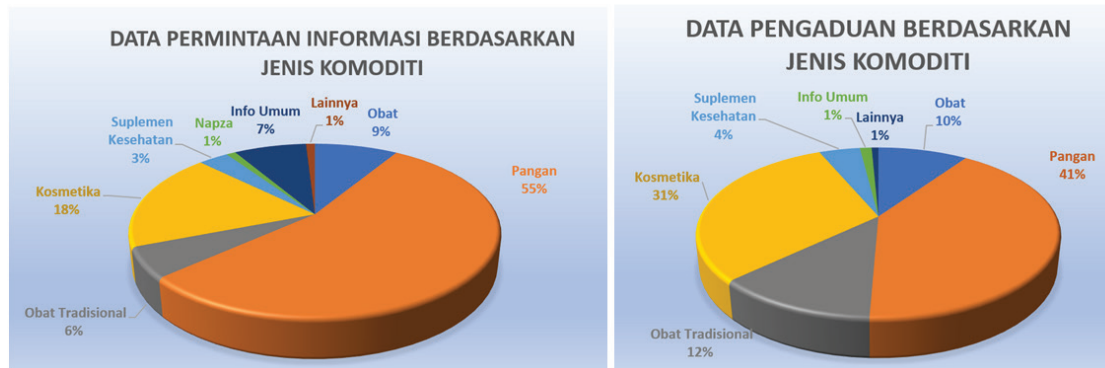
Gambar 19. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 28.085 (55%) layanan dan karyawan sebanyak 12.942 (25,36%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 731 (38,13%) layanan dan karyawan sebanyak 442 (23%) layanan.



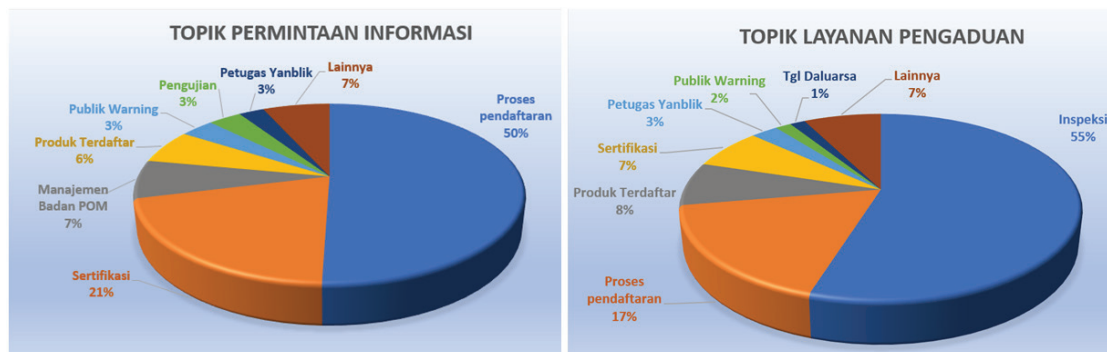
Gambar 20. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 17.087 (33,5%) layanan dan datang langsung sebanyak 13.175 (25,82%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui Whatsapp sebanyak 502 (26,18%) layanan dan email sebanyak 427 (22,27%) layanan.



Gambar 21. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 27.899 (54,68%) layanan dan kosmetik sebanyak 9.318 (18,26%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 787 (41%) layanan dan kosmetik sebanyak 588 (30,67%) layanan.



Gambar 22. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 25.816 (50,6%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 10.582 (20,74%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang jadwal unit pelayanan publik, informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, produk terdaftar/legalitas produk, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, serta konsultasi pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia. Adapun topik pengaduan yang banyak diadukan yaitu tentang inspeksi seperti pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan ilegal ataupun tidak sesuai ketentuan sebanyak 1.039 (54,87%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak 331 (18,59%) layanan. Topik pengaduan lain yang banyak diadukan terkait iklan atau materi promosi produk yang tidak memenuhi ketentuan.



# BAB VII

## Digitalisasi Pelayanan Publik

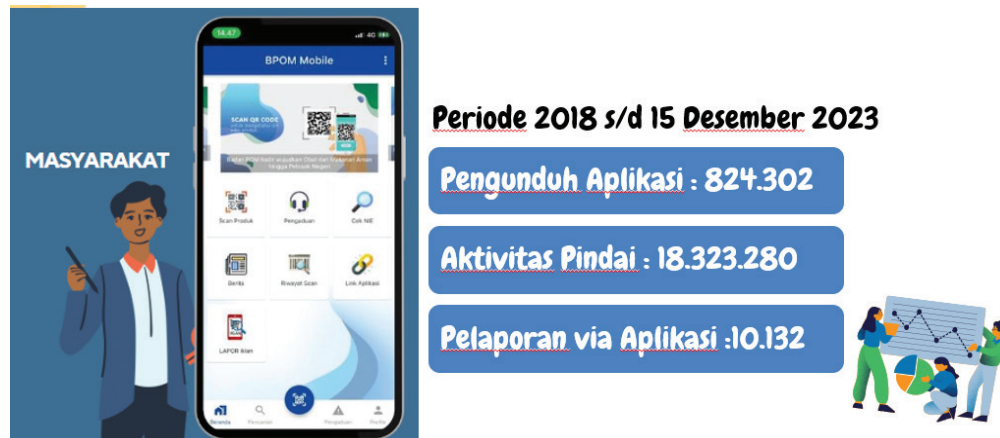
### 1. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (2D Barcode)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital Tahun 2023 dilakukan penyempurnaan melalui pelaksanaan pengadaan, sistem TTAC akan dilengkapi dengan informasi *e-labeling* (informasi penandaan produk secara digital) data halal pada sebagian produk komoditi obat tradisional dan suplemen kesehatan, penambahan menu sirop aman, menu e-penjelasan publik, pelaporan e-meso, serta penambahan link pada berita. Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk menambah informasi terkait produk obat dan makanan, serta kemudahan untuk masyarakat dalam membagikan berita dan penambahan *channel* pelaporan e-meso. Dalam rangka percepatan implementasi 2D Barcode, Badan POM melakukan pendampingan kepada pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat.



## 2. BPOM *Mobile*

BPOM *Mobile* merupakan aplikasi *mobile* yang memudahkan masyarakat dalam memverifikasi produk, hanya dengan melakukan pemindaian 2D *Barcode* yang ada pada kemasan, memberikan kemudahan akses berita *up to date* serta kemudahan akses informasi dan pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan. Inovasi teknologi dalam pengawasan Obat dan makanan melalui pembangunan aplikasi BPOM *Mobile* dimulai sejak 2018. Aktivitas BPOM *Mobile* dari 2018 – hingga 15 Desember 2023 sebagai berikut:



Gambar 23. Aktivitas pada BPOM *Mobile* Periode 2018 – 15 Desember 2023

### 3. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)

Sesuai timeline pengembangan SIPT, di Triwulan IV, pengembangan modul portal layanan pihak ketiga masuk dalam tahapan finalisasi. Portal layanan pihak ketiga direncanakan dapat digunakan oleh pelanggan mulai awal Januari 2024. Diharapkan pengembangan modul ini dapat memudahkan pelanggan dalam memanfaatkan layanan pengujian di laboratorium UPT Badan POM

Pengawasan post-market produk senantiasa dilakukan oleh Badan POM dalam upaya memastikan produk obat dan makanan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut ini adalah ringkasan jumlah data pengawasan post-market obat dan makanan yang telah dientri melalui Aplikasi SIPT.

#### STATISTIK SIPT - NASIONAL

PER TANGGAL 21 DESEMBER 2023



Gambar 24. Statistik Pemanfaatan SIPT s.d. Triwulan IV Tahun 2023

#### 4. Website BPOM

Keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan memegang peranan strategis dalam mendukung efektivitas Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, BPOM sebagai Badan Publik Informatif senantiasa berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejalan dengan improvement keterbukaan informasi publik serta komitmen mempertahankan gelar BPOM sebagai instansi informatif maka dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi redesign website BPOM sepanjang tahun 2023.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi:



#### Data Statistik Pengunjung Website

Kategori	2021	2022	2023
KUNJUNGAN MENU PERINGATAN PUBLIK	108.565 kali	159.764 kali	1106.538 kali
KUNJUNGAN MENU PENJELASAN PUBLIK	345.471 kali	353.021 kali	313.786 kali
KUNJUNGAN MENU BERITA AKTUAL	173.355 kali	119.474 kali	159.893 kali

Melihat kecilnya nilai kunjungan pengunjung dibanding besarnya penduduk Indonesia, maka diperlukan branding kuat dari website sebagai media informasi hanya 2 juta kunjungan pertahun. Kunjungan cenderung menurun ini juga sebanding dengan turunnya issue mengenai pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM.

## 5. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Aplikasi CekBPOM telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sebagai pusat informasi produk obat dan makanan yang beredar serta mempermudah pengawasan obat dan makanan post market. Pengembangan CekBPOM mencakup penyempurnaan *dashboard*, penyempurnaan fitur penjelasan publik, penambahan komponen data produk berdasarkan kebutuhan pengguna, penambahan manajemen produk sirop aman, dan pengembangan sesuai kebutuhan aplikasi registrasi dan BPOM Mobile.

Pengembangan fitur penjelasan publik digunakan untuk mengelola data produk penjelasan publik berdasarkan data yang ada di aplikasi CekBPOM atau produk yang tidak terdaftar di BPOM. Pengembangan fitur ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data produk penjelasan publik.





# BAB VIII

## Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, telah ditetapkan 30 (Tiga Puluh) Peraturan Badan POM, 115 (Seratus Lima Belas) Keputusan Kepala Badan POM, 103 (Seratus Tiga) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (Satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

### 1 Judul Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

### 3 Judul Rancangan Peraturan Pemerintah

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan POM
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

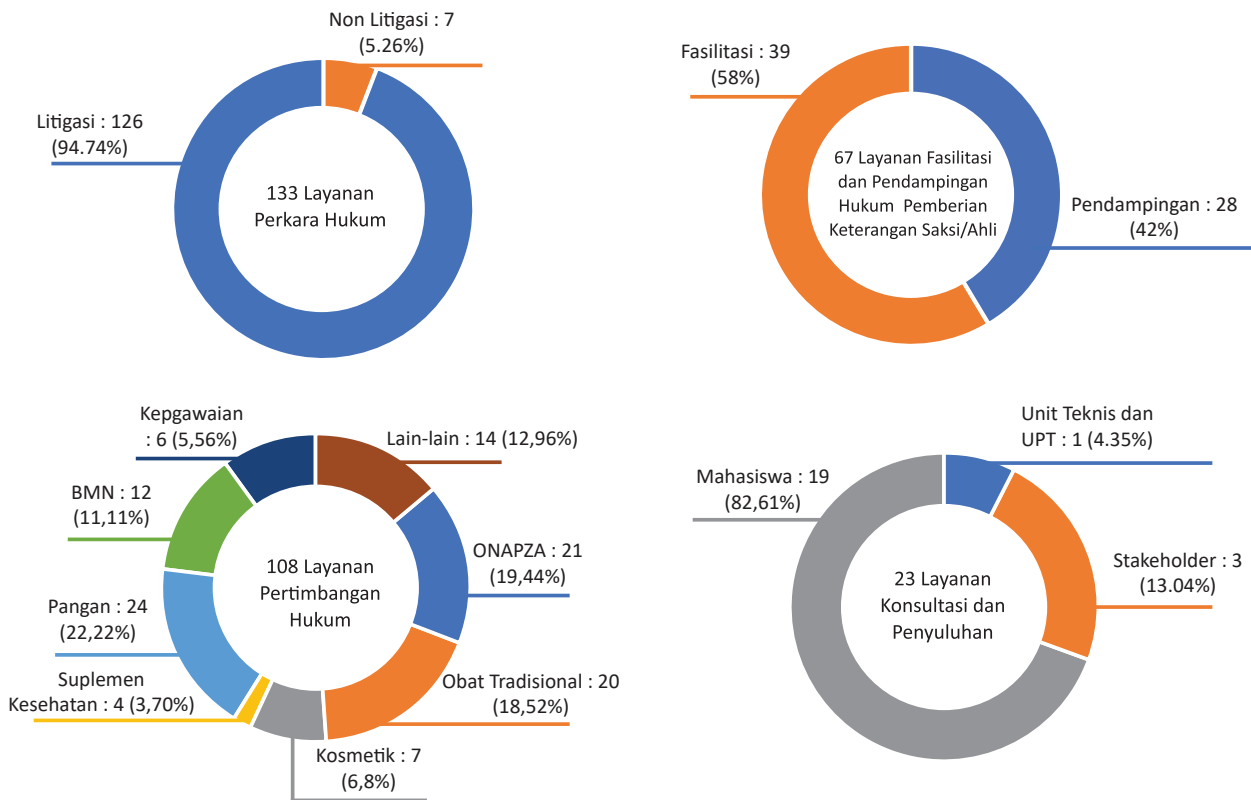
## Judul Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin.
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat Terhadap Cemaran Nitrosamin.
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi.
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antibakteri.
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Mutu Produk Obat Inhalasi dan Nasal.
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan.
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023.
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kategori Pangan.
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi Dan Pedagang Besar Farmasi.
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Bpom Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.

16. Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan.
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik.
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional.
21. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
22. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan Dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan.
23. Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Registrasi Pangan Olahan.
24. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Suplemen Kesehatan.
25. Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam.
26. Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Penggunaan Obat Dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasca Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Indonesia.
27. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan POM.
28. Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
29. Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Bahan Alam.
30. Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pedoman Klaim Khasiat Obat Bahan Alam.

### Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat pada berikut.



Gambar 25. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan IV 2023





# BAB IX

## Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

### 1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi dan penataan UPT BPOM, BPOM telah mendapatkan tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB terhadap perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM serta peningkatan klasifikasi 8 Loka POM menjadi Balai POM pembentukan 3 Loka POM baru, serta perubahan nama, lokasi, dan wilayah kerja 45 UPT BPOM. Sebagai tindak lanjut, BPOM telah melakukan penetapan 2 (dua) Peraturan BPOM sebagai berikut:

- a. Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.
- b. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.

Sebagai upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah, Kepala BPOM meresmikan 8 Balai POM dan 3 Loka POM yang diselenggarakan secara terpusat pada tanggal 24 Oktober 2023 dan dihadiri oleh 10 Bupati/Walikota yang diresmikan. Dengan demikian, saat ini terdapat 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi.

### 2. Tata Laksana

#### a. *Entry Meeting* Pelaksanaan Audit Surveilan dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM

Kegiatan exit meeting Audit ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 yang dihadiri oleh Deputi Manajemen Puncak BPOM, seluruh Kepala Unit Kerja, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal, Lead Auditor PT Sucofindo serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM secara luring di Aula Bhinneka Tunggal Ika dan daring melalui zoom meeting. Pada pertemuan exit meeting, PT Sucofindo selaku penyedia jasa Surveilan dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 Tahun 2023 menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan berupa kesimpulan memperoleh/mempertahankan sertifikasi penerapan sistem manajemen pada seluruh unit kerja dengan rincian yang terlihat pada grafis berikut:

## Exit Meeting Audit Eksternal ISO 9001, 37001, dan 45001 BPOM



### Pelaksanaan

- Dielenggarakan pada 15 November 2023
- dihadiri oleh Deputy Manajemen Puncak, Kepala Unit Kerja, Tim KAL, Tim KMR, Lead Auditor PT Sucofindo, dan Perwakilan MR Unit Kerja secara luring dan daring

### Overview

Merupakan pertemuan penutup pelaksanaan Audit Surveilans dan Resertifikasi ISO 9001:2015, 37001:2016, dan 45001:2018 BPOM Tahun Anggaran 2023

### Pelaksanaan

- Dielenggarakan pada 15 November 2023
- dihadiri oleh Deputy Manajemen Puncak, Kepala Unit Kerja, Tim KAL, Tim KMR, Lead Auditor PT Sucofindo, dan Perwakilan MR Unit Kerja secara luring dan daring





### Hasil Pelaksanaan Audit Surveilans ISO 9001:2015

85 Unit Organisasi BPOM tetap mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sampai audit selanjutnya

### Hasil Pelaksanaan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015

19 UPT BPOM dapat memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015



### Hasil Pelaksanaan Audit Surveilans ISO 37001:2016

Inspektorat Utama, Dit. Registrasi Pangan Olahan, Bira Unsur, Pasadatin, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Bandung tetap mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyebaran ISO 37001:2016 sampai audit selanjutnya

### Hasil Pelaksanaan Audit Surveilans ISO 45001:2018

BBPOM di Mataram tetap mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018 sampai audit selanjutnya



### Hasil Pelaksanaan Audit Surveilans ISO 37001:2016

Inspektorat Utama, Dit. Registrasi Pangan Olahan, Bira Unsur, Pasadatin, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Bandung tetap mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyebaran ISO 37001:2016 sampai audit selanjutnya

### Hasil Pelaksanaan Audit Surveilans ISO 45001:2018

BBPOM di Mataram tetap mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018 sampai audit selanjutnya



### Hasil Pelaksanaan Audit Surveilans ISO 45001:2018

BBPOM di Mataram tetap mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018 sampai audit selanjutnya

### Hasil Pelaksanaan Audit Surveilans ISO 37001:2016

Inspektorat Utama, Dit. Registrasi Pangan Olahan, Bira Unsur, Pasadatin, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Bandung tetap mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyebaran ISO 37001:2016 sampai audit selanjutnya

## b. Entry Meeting Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIPT BPOM Tahun 2023

Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 BPOM merupakan evaluasi atas penerapan QMS BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan klausul ISO 9001:2015 9.3 Management Review, Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi.

Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2023 telah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Berdasarkan hasil closing-meeting audit eksternal oleh PT. Sucofindo pada tanggal 15 November 2023 seluruh Unit Kerja direkomendasikan untuk memperoleh/mempertahankan sertifikasi penerapan sistem manajemen. Pada kesempatan ini, Plt. Kepala BPOM selaku Manajemen Puncak menyerahkan secara simbolis:

- 1) Sertifikat ISO 9001:2015 kepada Loka POM di Kabupaten Tulangbawang.
- 2) Sertifikat ISO 37001:2016 simbolis kepada Biro Umum.
- 3) Surat Rekomendasi ISO 45001:2018 kepada Balai Besar POM di Mataram.

### TINJAUAN MANAJEMEN ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2023

**OVERVIEW**

Merupakan pelaksanaan klausul 9.3 Management Review, di mana Manajemen Puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi

**PELAKSANAAN**

Dilaksanakan di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta pada 30 November 2023. Tinjauan Manajemen dipimpin oleh Plt. Kepala BPOM selaku Manajemen Puncak, diikuti oleh Pimpinan Tinggi Madya selaku Deputi Manajemen Puncak, Kepala Unit Kerja selaku Ketua QA, Tim KMS, Tim KAL, dan MR Unit Kerja.

INPUT	OUTPUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya</li> <li>Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan SMM</li> <li>Informasi tentang kinerja dan efektivitas SMM</li> <li>Kecukupan sumber daya</li> <li>Efektivitas tindakan yang diambil untuk merangsi risiko dan peluang</li> <li>Peluang peningkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peluang peningkatan</li> <li>Setiap kebutuhan perubahan pada SMM</li> <li>Kebutuhan sumber daya</li> </ul>

**PENYERAHAN SERTIFIKAT**

Plt. Kepala BPOM menyerahkan secara simbolis:

- Sertifikat ISO 9001:2015 kepada Loka POM di Kabupaten Tulangbawang
- Sertifikat ISO 37001:2016 kepada Biro Umum
- Surat rekomendasi ISO 45001:2018 kepada Balai Besar POM di Mataram

**DOKUMENTASI**






# BAB X

## Kerjasama Internasional

### 1. Kunjungan BPOM di *The Center for State Control of Medicines, Medical Equipment and Devices (CECMED)*, *BioCubaFarma*, dan *Centro de Inmunologia Molecular (CIM)*.

Kunjungan ini bertujuan sebagai pendampingan dalam proses transfer teknologi produk bioteknologi obat kanker *Theracim* (Nimotuzumab) dari CIM Kuba kepada Industri Farmasi dalam negeri, termasuk pembuatan *Drug Substance* (DS) dan *Drug Product* (DP) sehingga dapat mendukung ketersediaan produk dalam negeri.



Badan POM akan mengidentifikasi potensi kerja sama dengan CECMED Kuba terkait transfer teknologi produk biofarmasetikal ke Indonesia dan mendukung proses keanggotaan CECMED dalam organisasi internasional seperti *Pharmaceutical Inspection Convention* (PIC/s).

### 2. Guna Capai SDM Berdaya Saing Global, Badan POM Kerja Sama dengan Universitas Ternama di Amerika Serikat Untuk Peningkatan Kapasitas SDM

Kepala Badan POM berkunjung ke Harvard Kennedy School, Boston, Amerika Serikat pada 24 -30 September 2023 untuk mendapatkan wawasan mengenai program peningkatan kapasitas di Harvard Kennedy School termasuk pelatihan di bidang *Strategic Management of Regulatory And Enforcement Agencies* yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi Badan POM dalam merancang kebijakan yang efektif, mengatasi perubahan, dan menghadapi tekanan politik serta deregulasi yang mungkin muncul.



Selain itu, Kepala Badan POM juga berkunjung ke Michigan, Amerika Serikat pada 4-8 Oktober 2023 untuk penandatanganan MoU dengan Michigan State University mengenai pengembangan kapasitas SDM. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pembahasan rencana program pelatihan dan pembiayaan kegiatan di bawah MoU. Rencana kolaborasi ini akan dilaksanakan di bawah program sinergisme pemangku kepentingan (*Academia-Business-Government*) karena pada prinsipnya keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama termasuk juga pelaku usaha.



Dalam kesempatan tersebut, Badan POM juga bertemu dengan Neogen di Michigan Amerika Serikat untuk berdiskusi mengenai alat laboratorium/test kits yang dikembangkan oleh Neogen yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai usaha peremajaan terhadap alat laboratorium/test kits dalam Mobil Keliling (Mobling) menjadi lebih *advance* dan cepat.

### 3. Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Wirawati Catur Panca (WCP)

Pada tanggal 24 Oktober 2023, BPOM menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dengan Wirawati Catur Panca (WCP) tentang Pemberdayaan Wirawati Catur Panca di Bidang Obat dan Makanan. Wirawati Catur Panca adalah salah satu mitra strategis perpanjangan tangan BPOM dalam edukasi obat dan makanan aman kepada masyarakat.



Tujuan dari MOU ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan dalam rangka membangun keluarga sehat dan sejahtera. Dengan adanya MOU ini, menunjukkan bahwa BPOM terbuka untuk memperluas kerja sama dengan para pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

#### 4. Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah



Kepala BPOM, Penny K. Lukito, menandatangani Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah di Mojokerto dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (RMI PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya pengembangan Santripreneur di Pondok Pesantren pada hari Kamis, 2 November 2023. Kerja sama ini antara BPOM dengan pondok pesantren ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, maupun mengembangkan kewirausahaan di bidang obat dan makanan.

Ketua RMI PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, KH. Muhammad Nilzam Yahya, mengungkapkan rasa bangganya atas penandatanganan nota kesepahaman tersebut. “Saya merasa bangga dan bahagia karena diundang BPOM. BPOM hadir di Ponpes itu luar biasa. Ada tiga hal yang kami harapkan. Pertama adanya keberlanjutan atau tindak lanjut dari MoU ini, yaitu terkawal dan terjaminnya makanan santri. Kedua adanya pendampingan intensif kepada santri dan alumni yang menjadi pelaku usaha. Dan ketiga, kerja sama ini istiqamah,” harapnya.

#### 5. Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Universitas Sahid (USAHID)

Kepala BPOM, Penny K. Lukito, menandatangani Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Universitas Sahid (USAHID) tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di Jakarta pada hari Jumat, 3 November 2023.

Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara BPOM dengan USAHID) dalam rangka, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.



Kerja sama yang telah diimplementasikan antara BPOM dan USAHID sebelumnya antara lain seperti pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan & Magang pada program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC) dan Kompetisi Nasional BPOM (KOMIK) serta kegiatan BPOM lainnya.

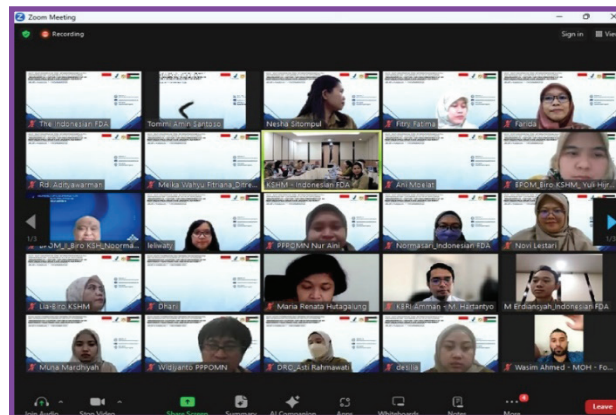
Selanjutnya, BPOM dan USAHID akan menyiapkan rencana aksi yang akan menjelaskan secara rinci ruang lingkup kerja sama dalam MOU tersebut dengan semangat kolaborasi untuk saling mendukung tugas pendidikan dan pembangunan bangsa khususnya di bidang pengawasan Obat dan Makanan

## 6. Penyelenggaraan Program KSS bagi Regulator Obat dan Makanan Palestina

KSS ini bertujuan untuk melanjutkan komitmen Badan POM dalam mendukung pembentukan Otoritas Obat dan Makanan di Palestina yang independen, melalui peningkatan kapasitas regulator Obat dan Makanan Palestina.

Kegiatan KSS Palestina tahun 2023 ini diikuti oleh 39 (tiga puluh sembilan) peserta dari Kementerian Kesehatan Palestina. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Kementerian Kesehatan Palestina telah memperoleh berbagai materi pelatihan yang dikategorikan seperti Regulasi dan persyaratan kriteria GMP, pengawasan distribusi dan peredaran, serta administrasi dan sistem informasi.

Kementerian Kesehatan Palestina berharap untuk adanya pelatihan secara luring di Palestina atau di Yordania agar dapat berdiskusi secara mendalam dalam kelompok kecil dan melakukan simulasi.







# BAB XI

## Sumber Daya Manusia

### 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

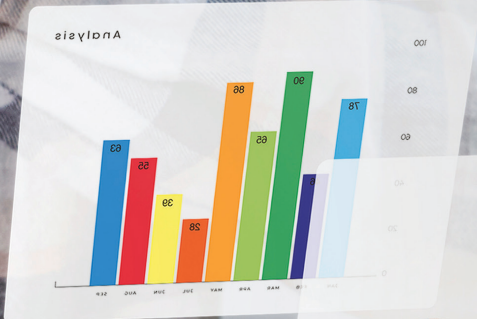
Pada triwulan IV ini telah dilaksanakan pengumuman dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2023. Dari 222 formasi dengan rincian alokasi kebutuhan jabatan yang didasarkan kualifikasi pendidikan jumlah kebutuhan dan jenis kebutuhan serta penempatan, terdapat 164 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK BPOM Tahun Anggaran 2023.

Selain itu pada triwulan ini, sehubungan dengan telah dilakukannya penempatan PPPK Badan POM Tahun Anggaran 2022 pada Unit Kerja masing-masing, maka pada Hari Rabu, 01 November 2023 telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja PPPK Badan POM Tahun 20233 secara serentak di seluruh Indonesia.

### 2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Aplikasi *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS) merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di Badan POM. Aplikasi tersebut memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelian secara *online* kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS adalah webinar/diskusi *online* yang dapat diikuti oleh pegawai Badan POM dengan narasumber yang berasal dari internal Badan POM maupun eksternal. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat *online* di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>.

Badan POM juga memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management*. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Pada triwulan IV 2023, sebanyak 163 data/informasi/pengetahuan telah *publish* dan dikelola dalam aplikasi SIMPHONI.



# BAB XII

## Realisasi Anggaran Sampai dengan November 2023

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.196.389.390.000 ,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM. Realisasi anggaran per November tahun 2023 sebesar, Rp1.906.599.668.150,- (86,81%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp739.210.410.250,-,realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp 1.019.693.764.424,- ,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp147.695.493.476 ,-.



Gambar26. Realisasi Anggaran s.d November 2023

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
<b>Pusat</b>	851.467.859.000	739.210.410.250	86,82%
<b>Balai Besar/ Balai POM</b>	1.159.546.840.000	1.019.693.764.424	87,94%
<b>Loka POM</b>	185.374.691.000	147.695.493.476	79,67%
<b>Total</b>	2.196.389.390.000	1.906.599.668.150	86,81%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
<b>Pagu</b>	723.920.415.000	1.240.046.365.000	232.422.610.000	2.196.389.390.000
<b>Realisasi</b>	631.071.779.007	1.084.977.700.968	190.550.188.175	1.906.599.668.150
<b>%</b>	87,17%	87,49%	81,98%	86,81%



# BAB XIII

## Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2023. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per bulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan IV\* Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada buku ini.



### PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta continuous Improvement.



# LAMPIRAN I



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	93.3	%	82.65	88.59%
		Indeks Pengawasan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	275	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	73	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93.5	%	94.41	100.97%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	84.2	%	89.35	106.12%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89.5	%	92.15	102.96%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	79	%	88.92	112.56%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	%	88.78	98.64%
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	90.35	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93	%	93.73	100.78%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	70	%	65.92	94.17%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	94	%	95.04	101.11%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	65	%	66.42	102.18%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	68	%	75.10	110.44%
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.39	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	%	86.30	109.24%
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	95	Nilai	95.05	100.05%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	2,700	Sekolah	(progress) 92,82%	
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	874	Desa	(progress) 90,50%	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	350	Pasar	(progress) 95,66%	
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	96.73	96.73%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	95.63	95.63%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	77	%	76.69	99.60%
		Indeks RB UPT	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP UPT	83	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium/GLP	86	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5	Indeks	2.92	116.80%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.5	Nilai	82.44	87.24%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88	%	86.96	98.82%
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	85	%	100	117.65%
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	90	%	85.43	94.92%
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	94	%	100	106.38%
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	86.9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	91	Nilai	92	101.10%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	83	%	85	102.41%
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	83	%	84.21	101.46%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	83	%	87.5	105.42%
		Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman	70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	81.8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	91	%	75	82.42%
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	86	%	86.18	100.21%
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	77	%	77.54	100.70%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	86	%	100	116.28%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	83	%	89.16	107.42%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78	%	80.56	103.28%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	95	%	100	105.26%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	63	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	91.1	100.11%
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4.55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	%	100	101.01%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	76	%	72.54	95.45%
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	16	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	65	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase keputusan hasil pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	92	%	98.17	106.71%
		Persentase koordinasi Pengawasan Produksi Pangan fortifikasi yang dilaksanakan	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	87	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	254	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	92.09	101.20%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85.25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	92	%	95	103.26%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	%	79.50	90.34%
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	%	78.79	89.53%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/ Balai POM/Loka POM	86	%	98.63	114.69%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	88	%	89.66	101.89%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	84	%	85.03	101.23%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	%	95.39	104.82%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	83	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93	%	93.04	100.04%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	%	98	98.00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik distribusi obat	91	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	87	%	94	108.05%
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	87	%	100	114.94%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dana pelayanan obat oleh Balai	81	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	94	%	94.5	100.53%
		Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	2.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	49	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	76	%	78.12	102.79%
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18100	Dokumen	20856	115.23%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.25	Indeks	4.64	109.18%
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	94.44	%	93.77	99.29%
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	70.13	100.19%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label, iklan obat, dan NPP yang ditindaklanjuti	87	%	77.02	88.53%
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60400	Label dan Iklan	57673	95.49%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89.4	Indeks	94.43	105.63%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas KMEIONAPPZA	98	%	100	102.04%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	71	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah sarana peredaran yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	850	sarana	1989	234.00%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86	indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan post market sesuai standar	254	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang dilakukan sesuai standar	95	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik	84	%	84	100.00%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.61	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	63,322	Permohonan	62,284	98.36%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	94	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB	65	%	74.07	113.95%
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	91	%	93.1	102.31%
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	100	%	77.78	77.78%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	78	%	76.79	98.45%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	89	%	90.45	101.63%
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	78	%	52.27	67.01%
		Persentase Keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, Obat, Produk Biologi dan Sarana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	80	%	76.14	95.18%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	75	%	51.39	68.52%
		Nilai RB Ditwas Produksi ONPP	88.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Ditwas Produksi ONPP	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas Produksi ONPP	95	%	95	100.00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91	%	82.62	90.79%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	94.17	99.13%
		Persentase pengaduan terkait Registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100.00%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.55	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	Indeks	75.68	83.16%
		Persentase pendampingan di bidang Registrasi pangan olahan yang efektif	95	%	99.51	104.75%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98.7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99	%	100	101.01%
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	89.5	%	87.49	97.75%
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	77	%	74.55	96.82%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	79	%	82.75	104.75%
		"Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat yang ditindaklanjuti "	100	%	100	100.00%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Obat	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	87	%	86.36	99.26%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100	100.00%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	90.1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	89.3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2.5	Indeks	1.5	60.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	95	%	100	105.26%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	94	%	89.22	94.91%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	85	Indeks	89.02	104.73%
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	83	%	89.42	107.73%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	75	%	95.17	126.89%
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik	4.55	Indeks	4.78	105.05%
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	83	%	83.94	101.13%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	78	%	90.14	115.56%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	88	%	88.2	100.23%
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	89.7	Indeks	92.14	102.72%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	2.5	%	3	120.00%
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	97	%	100	103.09%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83.7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai tahapan penyusunan	93	%	94	101.08%
		Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	92.5	%	125	135.14%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95.5	%	99	103.66%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88.8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2.75	Indeks	3	109.09%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	100	100.00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	77.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	94	%	91.64	97.49%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	90	%	95	105.56%
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	92	%	92.5	100.54%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	99.4	109.23%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	95	95.00%
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	86.1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholders yang efektif	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	90	%	87.01	96.68%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	89.3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	100	100.00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan sesuai dengan pedoman	72	%	67.40	93.61%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	89	Indeks	91.26	102.54%
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	34	%	progress 95%	
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	300	Kab/Kota	progress 92%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95.5	%	progress 89%	
		Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	227	UMK	240	105.73%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4.55	Indeks	4.83	106.15%
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	446	Pemda	480	107.62%
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	740	Kader/fasilitator	909	122.84%
		Tingkat efektivitas KIE makanan	95.12	%	95.12	100.00%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	87	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86.75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2.5	Indeks	2.75	110.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92	%	100	108.70%
		Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/ Pengujian	86	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM	30	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	92	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		"Persentase laboratorium Balai Besar/ Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium"	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	91.2	%	89.92	98.60%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	90.63	%	90.06	99.37%
		"Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar"	100	%	106.28	106.28%
		"Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu"	94	%	98.73	105.03%
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	86	%	86	100.00%
		Indeks RB PPPOMN	87.6	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	80.2	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Status Akreditasi	86	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	95.3	nilai	82.1	86.15%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	70	%	58.5	83.57%
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	86	%	89.04	103.53%
		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	85	%	87.5	102.94%
		Persentase Perkara yang Meningkatkan Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	52	%	60	115.38%
		Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian	65	%	60	92.31%
		Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar	70	%	69.62	99.46%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	66.3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	91	%	100	109.89%
		1.20	Analisis Kebijakan di bidang Obat dan Makanan	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan dibidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80	%
Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96			%	84.55	88.07%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88.7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79.6	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86.9	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92.5	nilai	60.28	65.17%
		Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100	100.00%
		Indeks kepuasan internal terhadap layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3.63	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	84	Nilai	87.08	103.67%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	84	%	91.67	109.13%
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	86	%	113.95	132.50%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos	84	%	100	119.05%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	84	%	100	119.05%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kos yang sesuai standar	96	%	88.39	92.07%
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	96.08	%	98.28	102.29%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4.25	Indeks	4.66	109.65%
		Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos	294	komunitas	335	113.95%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2.2	Indeks	3	136.36%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99	%	93.12	94.06%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	87.11	102.48%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	80	%	80.5	100.63%
		Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	86.68	101.98%
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	90	%	94.14	104.60%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	78.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86.9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	90	%	92	102.22%
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	34.4	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Opini	WTP	100%
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	74.22	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94.5	Nilai	90.41	95.67%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Media	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kerja sama yang efektif	88	%	72.82	82.75%
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6.06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8.77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	99.01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94	%	91.68	97.53%
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	Negara	2	100.00%
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	84	%	76.15	90.65%
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	%	100	111.11%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.85	%	99.23	99.38%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	88	%	73.43	83.44%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	79	%	79.34	100.43%
		Persentase publikasi kinerja B POM sesuai agenda setting	95.5	%	97.81	102.42%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	%	72.2	82.05%
		Indeks kepuasan media	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks opini publik B POM	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal B POM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas dan Humas	3.87	Indeks	3.89	100.52%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB B POM Penguatan Akuntabilitas	4.74	Nilai	Indikator ini sudah tidak dihitung kembali sejak akhir TW 3, sehingga seterusnya akan dicabut dari PK	
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja B POM	74.22	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) B POM	96	Nilai	78.41	81.68%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) B POM	95.57	Nilai	96.98	101.48%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan B POM yang disusun dengan SAP	100	%	100	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3.84	Indeks	3.34	86.98%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	81.39	%	76	93.38%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	92.2	92.20%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	65	65.00%
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	100	100.00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4.63	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7.43	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan tata laksana	5.71	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.8	Indeks	3.82	100.53%
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	91.02	91.02%
		Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100.00%
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.6	%	99.45	99.85%
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	96.26	%	96.4	100.15%
		Indeks Pelayanan Publik	4.6	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87.25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi	2.5	Indeks	2.75	110.00%
		Tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95.7	%	95.7	100.00%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	6.04	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Sistem Merit	0.94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3.47	Indeks	3.67	105.76%
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	77	Indeks	52.54	68.23%
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	93	%	99.67	107.17%
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.07	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	74	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan	82.5	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro SDM	84.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM	2.5	Indeks	2.5	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	100	100.00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	81	%	81.38	100.47%
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	851	SDM	983	115.51%
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	4.71	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	62	%	55.8	90.00%
		Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	94	Kerja Sama	100	106.38%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Nilai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4.47	Nilai	4.64	103.80%
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	55	%	95.59	173.80%
		Nilai kepuasan Layanan PFM	4.1	Nilai	4.48	109.27%
		Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	89	Nilai	85	95.51%
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	87	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	94.5	Nilai	64.05	67.78%
		Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	96	%	95	98.96%
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3.3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.45	Indeks	3.46	100.29%
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	96	%	98.2	102.29%
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	39	%	45.5	116.67%
		Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time)	4	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	90	%	82.87	92.08%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	25	%	23	92.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	96	96.00%
		Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	85	Nilai	86.73	102.04%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	92.6	92.60%
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81.2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.9	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	Indeks	3	100.00%
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	75	%	75.94	101.25%
		Sertifikasi ISO 27001	1	sertifikat	1	100.00%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94.8	Nilai	54.63	57.63%
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6.06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat I	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah Inspektorat I	99.01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94	%	91.68	97.53%
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	85.9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100	100.00%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	95	%	94.79	99.78%
		Persentase Pengaduan Mitra Kerja Inspektorat I yang Ditindaklanjuti sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100	%	53	53.00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	100	106.38%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil movev rencana aksi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat I	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	87.2	Indeks	89.83	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	91	Indeks	90.92	99.91%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6.06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99.01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85.9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100	100.00%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	95	%	87.94	92.57%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	%	70	70.00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	100	106.38%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase Rekomendasi Hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat II	86.1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86.25	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	91	%	75	82.42%
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94	%	91.68	97.53%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	92	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	2.95	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	74	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.78	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	Persen	86	86.00%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	89	Persen	100	112.36%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	85	Persen	97.59	114.81%
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	87	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	88	Persen	90.31	102.63%
		Indeks RB Biro Umum	84.2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	76	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	91	%	95	104.40%



## LAMPIRAN II



## A. UNIT PUSAT

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
<b>1</b>	<b>Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan</b>	<b>367.489.417.000</b>	<b>20.342.332.972</b>	<b>87,17%</b>
1.1	Biro Kerjasama	15.438.337.000	12.971.209.702	<b>84,02%</b>
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	20.975.474.000	18.674.782.676	<b>89,03%</b>
1.3	Biro Hukum dan Organisasi	13.608.599.000	12.708.391.705	<b>93,39%</b>
1.4	Biro Umum	121.880.281.000	105.597.881.398	<b>86,64%</b>
1.5	Biro Sumber Daya Manusia	195.586.726.000	170.390.067.491	<b>87,12%</b>
<b>2</b>	<b>Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif</b>	<b>60.158.287.000</b>	<b>53.295.392.032</b>	<b>88,59%</b>
2.1	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	9.762.277.000	8.347.220.960	<b>85,50%</b>
2.2	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	13.612.718.000	11.901.288.736	<b>87,43%</b>
2.3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	12.464.912.000	11.203.165.594	<b>89,88%</b>
2.4	Dit. Registrasi Obat	12.501.315.000	10.949.166.626	<b>87,58%</b>
2.5	Dit. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	11.817.065.000	10.894.550.116	<b>92,19%</b>

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
<b>3</b>	<b>Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik</b>	<b>54.877.335.000</b>	<b>50.741.477.104</b>	<b>92,46%</b>
3.1	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	12.417.422.000	11.143.800.343	<b>89,74%</b>
3.2	Dit. Pengawasan Kosmetik	10.540.301.000	9.531.113.022	<b>90,43%</b>
3.3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	11.904.081.000	11.101.950.007	<b>93,26%</b>
3.4	Dit. Standadisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7.215.901.000	7.045.585.214	<b>97,64%</b>
3.5	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12.799.630.000	11.919.028.518	<b>93,12%</b>
<b>4</b>	<b>Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>	<b>68.248.617.000</b>	<b>59.851.684.038</b>	<b>87,70%</b>
4.1	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	18.223.845.000	16.656.380.724	<b>91,40%</b>
4.2	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15.185.625.000	12.218.941.217	<b>80,46%</b>
4.3	Dit. Registrasi Pangan Olahan	9.611.993.000	9.022.097.094	<b>93,86%</b>
4.4	Dit. Standdrdisasi Pangan Olahan	9.123.257.000	8.205.133.990	<b>89,94%</b>
4.5	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	16.103.897.000	13.749.131.013	<b>85,38%</b>



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
<b>5</b>	<b>Deputi Bidang Penindakan</b>	<b>56.006.456.000</b>	<b>52.373.058.350</b>	<b>93,51%</b>
5.1	Dit. Siber Obat dan Makanan	10.935.095.000	10.418.202.360	<b>95,27%</b>
5.2	Dit. Intelijen Obat dan Makanan	9.899.834.000	8.617.784.656	<b>87,05%</b>
5.3	Dit. Penyidikan Obat dan Makanan	8.379.254.000	7.554.671.000	<b>90,16%</b>
5.4	Dit. Cegah Tangkal	26.792.273.000	25.782.400.334	<b>96,23%</b>
<b>6</b>	<b>Inspektorat Utama</b>	<b>28.813.543.000</b>	<b>25.705.902.145</b>	<b>89,21%</b>
6.1	Inspektorat I	22.164.722.000	19.546.795.765	<b>88,19%</b>
6.2	Inspektorat li	6.648.821.000	6.159.106.380	<b>92,63%</b>
<b>7</b>	<b>Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional</b>	<b>83.479.677.000</b>	<b>65.570.940.991</b>	<b>78,55%</b>
<b>8</b>	<b>Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan</b>	<b>24.163.177.000</b>	<b>21.676.429.261</b>	<b>89,71%</b>
<b>9</b>	<b>Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan</b>	<b>59.955.894.000</b>	<b>48.764.698.785</b>	<b>81,33%</b>
<b>10</b>	<b>Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>48.275.456.000</b>	<b>40.888.494.572</b>	<b>84,70%</b>
	<b>TOTAL SATKER PUSAT</b>	<b>851.467.859.000</b>	<b>739.210.410.250</b>	<b>86,82%</b>

**B. BALAI BESAR / BALAI POM**

NO	UNIT KERJA	PAGU	TOTAL PAGU REALISASI	%
1	Bengkulu	27.403.405.000	25.216.974.630	92,02%
2	Jambi	34.248.272.000	31.332.776.984	91,49%
3	Denpasar	42.631.168.000	38.693.204.300	90,76%
4	Medan	47.096.753.000	42.603.611.693	90,46%
5	Pangkal Pinang	16.451.796.000	14.806.794.317	90,00%
6	Semarang	61.244.229.000	55.118.064.556	90,00%
7	Mataram	23.849.625.000	21.462.043.879	89,99%
8	Palu	24.232.741.000	21.801.672.752	89,97%
9	Palembang	30.186.657.000	27.128.313.054	89,87%
10	Manado	46.655.020.000	41.874.498.452	89,75%
11	Kupang	30.203.706.000	27.017.334.923	89,45%
12	Palangkaraya	21.100.557.000	18.866.029.479	89,41%
13	Kendari	29.150.995.000	26.026.437.675	89,28%
14	Pekan Baru	33.825.581.000	30.179.888.596	89,22%



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
15	Tarakan	14.743.647.000	13.153.918.770	89,22%
16	Mamuju	20.639.655.000	18.370.474.035	89,01%
17	Ambon	29.021.635.000	25.682.533.180	88,49%
18	Serang	28.047.163.000	24.779.529.136	88,35%
19	Makassar	55.506.110.000	48.875.020.195	88,05%
20	Samarinda	27.719.880.000	24.371.729.523	87,92%
21	Batam	22.702.216.000	19.952.710.059	87,89%
22	Gorontalo	18.594.112.000	16.338.674.071	87,87%
23	Padang	57.576.379.000	50.439.912.521	87,61%
24	Jakarta	50.693.015.000	44.356.753.099	87,50%
25	Banda Aceh	28.836.827.000	25.228.099.025	87,49%
26	Yogyakarta	44.147.345.000	38.602.427.541	87,44%
27	Bandung	73.084.519.000	63.457.601.047	86,83%
28	Bandar Lampung	31.276.287.000	27.065.585.321	86,54%
29	Pontianak	27.822.443.000	24.047.591.752	86,43%



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
30	Banjarmasin	31.985.025.000	27.592.864.930	86,27%
31	Surabaya	60.468.306.000	52.120.729.159	86,20%
32	Jayapura	26.913.341.000	23.008.462.529	85,49%
33	Manokwari	20.532.542.000	17.540.196.766	85,43%
34	Sofifi	20.955.888.000	12.581.306.475	60,04%
<b>TOTAL SATKER BALAI</b>		<b>1.159.546.840.000</b>	<b>1.019.693.764.424</b>	<b>87,94%</b>



## C. LOKA POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	Kabupaten Tanah Bumbu	4.099.183.000	3.717.057.079	90,68%
2	Kabupaten Belitung	3.226.557.000	2.901.068.743	89,91%
3	Kabupaten Kotawaringin Barat	4.080.538.000	3.664.942.566	89,82%
4	Kota Sungai Penuh	3.461.313.000	3.091.283.192	89,31%
5	Kota Payakumbuh	4.449.990.000	3.963.909.914	89,08%
6	Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.801.332.000	3.369.998.455	88,65%
7	Kabupaten Aceh Selatan	3.884.401.000	3.437.964.499	88,51%
8	Kota Lubuklinggau	3.734.843.000	3.298.936.101	88,33%
9	Kabupaten Tulangbawang	3.603.420.000	3.178.346.209	88,20%
10	Kabupaten Pulau Morotai	3.165.186.000	2.790.322.067	88,16%
11	Kabupaten Bima	3.935.415.000	3.465.737.408	88,07%
12	Kabupaten Ende	4.917.723.000	4.325.218.854	87,95%
13	Kabupaten Banggai	3.424.957.000	3.001.368.790	87,63%
14	Kabupaten Mimika	4.176.395.000	3.654.774.187	87,51%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
15	Kabupaten Banyumas	5.410.540.000	4.692.455.249	86,73%
16	Kabupaten Tangerang	5.062.365.000	4.369.983.997	86,32%
17	Kota Baubau	4.730.579.000	4.076.703.472	86,18%
18	Kabupaten Buleleng	4.598.246.000	3.937.905.692	85,64%
19	Kota Balikpapan	3.695.334.000	3.160.389.794	85,52%
20	Kabupaten Kediri	4.910.175.000	4.185.022.961	85,23%
21	Kabupaten Jember	3.965.400.000	3.378.650.778	85,20%
22	Kabupaten Dharmasraya	3.320.617.000	2.818.862.011	84,89%
23	Kota Dumai	4.549.521.000	3.857.303.160	84,78%
24	Kota Surakarta	5.294.190.000	4.472.020.194	84,47%
25	Kabupaten Sanggau	3.557.101.000	2.996.885.025	84,25%
26	Kabupaten Sorong	5.010.249.000	4.209.355.406	84,01%
27	Kabupaten Indragiri Hilir	4.265.423.000	3.577.984.380	83,88%
28	Kota Tasikmalaya	5.361.731.000	4.497.297.714	83,88%
29	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.661.898.000	3.064.559.402	83,69%



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
30	Kota Palopo	4.960.551.000	4.113.994.055	82,93%
31	Kota Tanjungpinang	3.615.481.000	2.992.070.233	82,76%
32	Kabupaten Merauke	3.523.629.000	2.902.812.586	82,38%
33	Kota Tanjungbalai	3.176.314.000	2.585.026.186	81,38%
34	Kabupaten Bogor	5.706.470.000	4.644.034.747	81,38%
35	Kabupaten Manggarai Barat	3.999.146.000	3.247.920.142	81,22%
36	Kabupaten Toba Samosir	3.187.567.000	2.574.376.317	80,76%
37	Kabupaten Rejang Lebong	13.319.936.000	9.604.197.775	72,10%
38	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	11.185.182.000	5.123.671.677	45,81%
39	Kabupaten Aceh Tengah	11.345.793.000	4.751.082.459	41,88%
<b>TOTAL SATKER LOKA</b>		<b>185.374.691.000</b>	<b>147.695.493.476</b>	<b>79,67%</b>
<b>TOTAL SELURUH SATKER</b>		<b>2.196.389.390.000</b>	<b>1.906.599.668.150</b>	<b>86,81%</b>






• • • •

**KINERJA BPOM  
DALAM ANGKA  
TRIWULAN IV\* 2023**

• • • •



 Jln. Percetakan Negara Jakarta Pusat  
10560

 021 4244691

 [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

 [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)

 @bpom\_ri

 Bpom RI